

PIDATO KENEGARAAN
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

DI DEPAN SIDANG
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
16 AGUSTUS 2001

REPUBLIK INDONESIA



MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Presiden Republik Indonesia



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati,

Para Ketua dan anggota Lembaga-lembaga Tinggi Negara yang saya hormati,

Yang Mulia Duta Besar negara-negara sahabat,

Hadirin serta Hadirat yang saya muliakan, dan seluruh Rakyat Indonesia yang saya cintai, di manapun berada pada saat ini.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Izinkanlah saya pertama-tama mengajak kita sekalian untuk memanjatkan puji dan rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena hanya dengan rahmat-Nya jualah kita dapat berkumpul dalam balai agung yang terhormat ini. Kali ini, panjatan puji syukur tersebut rasanya memang mempunyai makna yang amat khusus.

Pertama, esok pagi Republik yang kita cintai ini akan memasuki usia ke-56. Selama satu tahun terakhir pula kita bersama-sama menunjukkan kepada diri kita sendiri dan kepada dunia luar, bahwa negara yang bermasyarakat majemuk ini, yang sepiantas demikian rentan terhadap konflik, ternyata mempunyai daya tahan yang besarnya di luar dugaan orang banyak. Hal itu jelas amat layak kita syukuri secara khusus.

Kedua, setelah melalui bulan-bulan yang menegangkan, yang sarat dengan konflik politik, bahkan konflik konstitusional, kita semua, dari golongan manapun juga, akhirnya berhasil membuktikan bahwa kita mampu menyelesaikan perbedaan pendapat dengan cara damai. Dengan segala kritik yang selama ini dimiliki, kita juga menyaksikan bahwa UUD Proklamasi ternyata masih dapat berfungsi dengan baik.

Sebelumnya, banyak pengamat dan negara-negara sahabat kita yang sungguh-sungguh khawatir bahwa kita akan merosot lebih jauh ke dalam keadaan anarkis. Syukur Alhamdulillah, semuanya itu tidaklah terbukti. Semangat kebersamaan, yang kita bangun dengan gigih dan dengan tidak mengenal bosan sejak awal abad ke-20 dahulu, ternyata jauh lebih kuat dari segala tantangan berjangka pendek yang kita hadapi. Insya Allah, sekarang kita sudah siap kembali menyingsingkan lengan baju untuk menangani demikian banyak masalah berat yang sudah lama menanti untuk kita benahi. Menurut penglihatan saya, itulah salah satu indikasi dari semakin matangnya kita sebagai bangsa.

Namun di atas itu semua, sesungguhnya ada hal yang lebih penting. Sejak awal pembentukan negara ini kita bersepakat, bahwa terbentuk dan terpeliharanya negara yang kita cintai ini adalah atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Saya yakin hal itu bukan hanya sekedar pernyataan keimanan dari rakyat kita yang amat religius, tetapi juga merupakan penjelasan yang tidak dapat dibantah oleh siapapun juga. Rasanya tidak ada penjelasan lain yang bisa menerangkan dengan persis mengapa

kita mampu mengatasi demikian banyak masalah yang demikian mendebarkan.

Sekali lagi, kita memang patut bersyukur, walau belum sepatasnya berpuas diri. Empat tahun terakhir ini bangsa kita hidup dalam kecemasan yang terns- menerus, karena secara beruntun kita didera oleh krisis moneter, krisis ekonomi, krisis keamanan, krisis politik, dan bahkan terasa adanya krisis dan konflik kelembagaan. Hal itu tidak hanya terasa di tingkat nasional, tetapi juga sampai ke desa-desa. Dapatlah difahami bila kemudian banyak yang khawatir, bahkan sangat mengkhawatirkan, apakah Republik yang dengan susah payah dibangun oleh pendahulu kita dapat bertahan hidup, ataukah akan pecah berantakan.

Saudara-saudara sekalian,

Dengan kondisi seperti ini, tidaklah mengagetkan bila kemudian timbul banyak pertanyaan, apakah kita mampu menyelesaikan seluruh krisis berwajah banyak itu dengan cepat dan secara serentak ? Sudah barang tentu tidak. Ibarat suatu penyakit, datangnya krisis bisa amat tiba-tiba, tetapi sembuhnya jelas hanya secara perlahan-lahan. Demikian banyak masalah dan tatanan yang harus kita benahi kembali, bukan hanya hal – hal teknis dan kecil tetapi juga adakalanya kita harus membenahi fungsi, struktur, dan metoda kerja institusi kebangsaan dan kenegaraan kita, baik di tingkat suprastruktur maupun di tingkat infrastruktur.

Di luar dugaan kita, kelemahan suprastruktur dan infrastruktur politik ternyata juga memberi peluang bagi mencuatnya berbagai konflik antar warga, dalam wujud dan intensitas yang tidak pernah kita saksikan sebelumnya. Korban sudah amat banyak, baik korban jiwa maupun harta benda. Banyak yang harus kita benahi sebelum kita dapat masuk ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang normal, setidaknya menurut tolok ukur yang lazim dikenal di

kalangan bangsa-bangsa modern. Persoalannya adalah, apa yang harus kita lakukan untuk melaksanakan pembenahan itu.

Kita perlu melakukan pembenahan tersebut berdasar visi dan dengan kekuatan kita sendiri, betapapun banyaknya kekurangan dan kelemahan yang masih kita miliki. Kita jelas mempunyai kemampuan untuk itu. Selama ini, kita sudah berhasil mengembangkan kemampuan sumber daya manusia yang memadai di segala tingkatan dan profesi, yang dapat didayagunakan secara maksimal untuk mengelola sumber daya nasional yang demikian kaya, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Tidak banyak negara di dunia yang dianugerahi sumber daya alam yang demikian melimpah. Seandainya seluruh sumber daya alam tersebut selama ini kita kelola dengan baik, rakyat kita mestinya sudah dapat hidup dalam Suasana yang jauh lebih Sejahtera. Sekarang kita harus mencari akar penyebab mengapa keadaannya tidak demikian. Mungkinkah kekeliruan tersebut terletak pada visi dan strategi pembangunan yang pernah kita anut? Ataupun pada mekanisme dan prosedur kerja yang selama ini kita pergunakan? Ataupun pada demikian banyak penyimpangan dalam pelaksanaannya?

Seluruhnya itu hanya kita lakukan secara bertahap dimulai dari hal yang paling mendesak dan tidak dapat ditunda. Krisis yang demikian banyak memang tidak mungkin diatasi sekaligus. Dalam jangka pendek, kita memerlukan pulihnya kembali kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang memberikan udara yang lebih segar, perasaan lebih aman, serta Suasana hidup yang lebih baik bagi seluruh rakyat kita. Hal itu bertalian erat dengan Normalisasi keadaan, yang antara lain memerlukan berfungsinya demokrasi dan tegaknya hukum. Kita sadar bahwa tidak banyak yang dapat kita lakukan apabila kondisi minimum ini tidak ada.

Banyak atau sedikit, kondisi minimum itu telah mulai kita wujudkan. Dalam Suasana yang semakin membaik, kita menyaksikan rakyat kita dapat mengembangkan dan mendayagunakan daya tahan, keuletan, serta daya kreasinya,

baik untuk bertahan hidup maupun untuk meningkatkan kesejahteraannya. Kita patut kagum terhadap daya tahan dan kreativitas rakyat kita ini. Selama terjadinya krisis moneter dan ekonomi dalam empat tahun ini, ketabahan dan kreativitas mereka bukan raja berhasil menopang hidup, tetapi juga ada kalanya terasa telah menyelamatkan Republik ini.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Agar langkah-langkah jangka pendek tersebut ada manfaatnya secara mendasar, kita juga perlu mengambil langkah-langkah strategis, yang berjangka menengah dan berjangka panjang, dan tidak mustahil bahkan yang bersifat sistemik. Mungkin kita bertanya dalam hati, mengingat berulang kalinya krisis konstitusional dalam kehidupan ketatanegaraan kita, apakah tidak ada hal yang perlu kita sempurnakan dalam kaidah konstitusional kita?

Akhir-akhir ini, di kalangan lapisan kepemimpinan dan kaum terpelajar kita telah timbul kesadaran bahwa kita perlu mengadakan amandemen yang lebih bersifat komprehensif dan lebih konseptual terhadap tatanan kenegaraan berdasar Undang-Undang Dasar 1945. Para Pendiri Negara sendiri mengidentifikasi kebutuhan itu dalam Pasal 37 UUD 1945.

Namun demikian, walaupun kita sepakat untuk melakukan amandemen tersebut, seyogyanya hal itu kita lakukan dengan hati-hati, dengan pemikiran yang mendasar serta matang, yang akan dapat memenuhi kebutuhan kenegaraan kita dalam jangka yang panjang. Kita ingin agar amandemen konstitusi yang kita lakukan bukan hanya mampu menjadi kerangka politik untuk kebersamaan kita dewasa ini, tetapi juga sebagai tumpuan kita untuk maju ke masa depan yang lebih adil, lebih demokratis, serta lebih sejahtera.

Untuk itu, dalam mempersiapkan, merumuskan, dan melaksanakan amandemen itu kita harus memegang teguh niat dasar didirikannya negara ini. Niat dasar tersebut tercantum

demikian gamblang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar. Para Pendiri Negara kita merumuskan sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur . Saya percaya bahwa kandungan nilai dari rumusan yang amat sederhana dan telah demikian kita kenal itu adalah begitu jernih dan tidak memerlukan penjelasan yang *njlimet*.

Tugas yang diberikan kepada Pemerintah Republik Indonesia juga demikian jelas, sederhana, dan gamblang, yaitu *"melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial"*.

Landasan moralnya juga demikian jernih, lugas, dan tegas, dan amat mendasar: *"Ke Tuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia"*

Bagi kita, rasanya yang harus kita lakukan bersama adalah menindaklanjuti aksioma-aksioma yang demikian padat dan jernih tadi, sehingga menjadi kenyataan riil yang dapat dinikmati setiap orang di kepulauan ini. Visi kenegaraan tersebut harus menjadi rujukan, sekaligus menjadi tolok ukur, baik bagi kehidupan kebangsaan dan kehidupan kenegaraan secara umum, maupun bagi setiap penyelenggara pemerintahan di tingkat Pusat dan daerah, yang diberi amanat oleh rakyat untuk melaksanakannya.

Kehormatan untuk memutakhirkan Undang-Undang Dasar 1945 sudah barang tentu terletak pada Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang secara konstitusional merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia.

Dalam hubungan inilah, dengan mengingat intensifnya wacana mengenai kebutuhan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 ini di Tengah masyarakat kita, dan untuk memberikan

peluang sebesar-besarnya bagi segala kalangan untuk memberikan sumbangan untuk penyempurnaan konstitusi tersebut, tampaknya akan besar manfaatnya jika MPR memusatkan perhatian pada penyusunan suatu kerangka acuan dasar, yang diharapkan akan dapat berfungsi sebagai rujukan utama bagi rancangan amandemen. Kerangka acuan dasar tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan wacana politik masyarakat. Substansi wacana yang berkembang dinamis itulah yang pada gilirannya dapat dikristalisasikan dan dirumuskan secara komprehensif, sistematis, dan berkeahlian oleh suatu komisi konstitusi, untuk akhirnya ditimbang dan diputuskan oleh Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat. Saya percaya langkah-langkah itu bukan saja akan memundurkan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung nilai historis yang demikian penting serta mengukuhkan watak demokratis dan keterbukaannya, tetapi juga akan memuluskan pelaksanaannya kelak.

Sidang yang saya muliakan,

Dalam meletakkan dasar-dasar amandemen yang lebih bersifat komprehensif dan lebih konseptual tadi, beberapa hal tampaknya memerlukan pemikiran mendalam, yang harus kita selesaikan secara mendasar. Beberapa di antaranya adalah: sifat negara kesatuan, yang secara melembaga dan secara operasional memberikan dan mengakui hak otonomi daerah; kebijakan dasar pemeliharaan kesatuan politik dan integritas wilayah nasional; hubungan institusional antara lembaga legislatif dan eksekutif; sistem pemilihan umum; hubungan antara pusat dan daerah; rumusan tentang implikasi kenegaraan dari kemajemukan bangsa kita, termasuk penghormatan terhadap adat, budaya serta institusi dari masyarakat tradisional kita. Esensinya adalah merumuskan wujud konkrit dari tatanan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan dalam format konstitusional, sehingga sesanti *Bhinneka Tunggal Ika* yang terdapat dalam Lambang Negara, dapat kita wujudkan dalam kenyataan.

Secara khusus, kita perlu memberi perhatian terhadap hubungan dan keterkaitan antara masyarakat tradisional kita yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia yang luas ini, dengan semangat kebangsaan, dan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kejernihan kita dalam memahami hubungan ketiga faktor ini merupakan faktor konstan, dan merupakan salah satu kunci penting untuk kelanggengan dan kemajuan Republik yang kita cintai.

UUD 1945 sendiri mengakui masyarakat tradisional dengan kampung halamannya sendiri itu dan menyebutnya sebagai "daerah yang bersifat istimewa".

Sejarah kita yang panjang, telah mencatat hubungan yang luas dan intensif antara warga berbagai masyarakat tradisional ini. Ada hubungan keluarga, hubungan adat istiadat dan kebudayaan, adakalanya hubungan keagamaan, serta hubungan ekonomi yang amat erat, antar warga suatu pulau dengan pulau lainnya. Jalinan sejarah yang amat kompleks ini dapat kita pandang sebagai landasan dan tumpuan sosial budaya yang amat kukuh bagi tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan dalam artian modern

Pembangunan Indonesia baru juga memerlukan penataan kembali hubungan antara pusat dan daerah. Kita sadar bahwa tatanan yang bersifat terlalu sentralistis selama ini bukan saja kurang efisien, tetapi juga kurang mampu memberikan peluang untuk tumbuh dan berkembangnya prakarsa dan kreativitas warganegara kita. Dalam tatanan hubungan pusat dan daerah ini, sebagian besar kewenangan dan dukungan anggaran negara semestinya diserahkan kepada Kabupaten dan Kotamadya. Sedangkan tugas dan kewenangan Pemerintah Pusat akan difokuskan pada beberapa bidang strategis saja, yang benar-benar dibutuhkan oleh seluruh bangsa.

Pada tataran yang lebih operasional, yang langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi politik hukum serta kebijakan penegakan hukum, juga diperlukan garis yang lebih jelas mengenai hakikat, sifat, ciri, metoda, dan wujud dari gerakan

reformasi serta proses demokratisasi yang kita lancarkan bersama sejak tahun 1998. Saya mengamati dan mendengarkan secara cermat keluhan sebagian masyarakat, bahwa di bawah bendera reformasi dan demokratisasi, telah terjadi banyak hal yang patut disangsikan apakah masih dapat dipandang secara absah sebagai suatu reformasi, ataukah sudah melebihi takarannya. Dalam beberapa kejadian, kita menyaksikan berlangsungnya kekerasan massa, yang sebagian di antaranya dilakukan atas nama reformasi dan demokratisasi. Rangkaian aksi tersebut telah menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya anarki di tengah masyarakat, baik dalam bentuk yang lunak, sedang, ataupun keras. Semua itu menimbulkan pertanyaan tentang perlunya pelaksanaan reformasi dan demokratisasi yang semestinya dilaksanakan dengan agenda yang jelas, secara bertahap, dan berlangsung dalam kerangka sistem demokrasi perwakilan, demokrasi tidak langsung yang kita anut, yaitu melalui dewan-dewan perwakilan rakyat. Dewan-dewan tersebut terdiri dari para wakil rakyat yang kita pilih sendiri melalui pemilihan umum yang berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, yang karenanya mesti kita percaya.

Kita memang tidak perlu menjawab seluruh masalah tersebut dari titik not. Selain mengkristalisasikan demikian banyak pengalaman kita dalam berbangsa dan bernegara, kita juga dapat memanfaatkan banyak gagasan yang berkenaan dengan pemajuan dan pemenuhan hak sipil dan hak politik, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya dalam keseluruhan penghormatan kita terhadap hak asasi manusia, dalam kerangka sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Harus kita akui, pemahaman kita terhadap hak asasi manusia dalam konteks dunia modern sekarang ini belumlah cukup mendalam dan meluas. Hal ini penting kita perhatikan karena hak asasi manusia ini justru berkembang cepat dan menjadi salah saw batu sendi, bahkan telah menjadi tolok ukur umum untuk menilai apakah suatu negara nasional itu sudah modern ataukah belum.

Hal lain yang juga perlu kita pikirkan dalam merumuskan dan melaksanakan pemutakhiran Undang-Undang Dasar 1945, adalah menurunnya disiplin sosial kita. Acapkali kita tidak konsisten melaksanakan apa yang sudah kita sepakati, yang berwujud pada kurangnya kepatuhan kepada hukum, dan kepada aturan permainan yang wajar dalam suatu negara nasional modern. Itu semua menampilkan kesan adanya sesuatu yang terputus antara apa yang kita pikirkan, kita katakan, serta kita perbuat dalam kenyataan hidup.

Kesulitan kita dalam memberantas praktek kolusi, korupsi, atau nepotisme (KKN), secara langsung atau tidak langsung telah menyebabkan keterpurukan kita sejak tahun 1997 dahulu. Berbeda dari tatanan masyarakat yang bersifat feodalistis, yang cenderung tidak melihat KKN sebagai suatu kesalahan besar, dalam tatanan demokrasi hal itu akan menjadi salah satu masalah besar. Kolusi, korupsi dan nepotisme, betapapun kecilnya, akan merupakan pelanggaran terhadap amanah orang banyak, sekaligus merupakan pelanggaran terhadap sumpah jabatan.

Dalam hubungan ini, izinkanlah saya dengan rendah hati melaporkan kepada sidang yang mulia ini, bahwa secara pribadi saya telah mengumpulkan seluruh keluarga dekat saya, dan meminta kepada mereka untuk sungguh-sungguh berjanji agar jangan membuka peluang sedikitpun bagi terulangnya KKN tersebut di kalangan keluarga saya.

Mereka telah memberikan janji dengan sungguh-sungguh, dan saya berharap mereka akan tahan terhadap demikian banyak godaan yang berasal dari lingkungannya.

Saya yakin kita akan melakukan terobosan besar dalam pencegahan dan penanggulangan KKN ini jika kita semua yang berada dalam ruang Nusantara ini berjanji setidaknya dalam hati untuk tidak akan melakukannya.

Saya juga telah meminta seluruh anggota Kabinet saya untuk melaporkan kekayaan mereka, dan secepatnya menyerahkannya kepada Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara.

Walau kelihatannya sederhana, mungkin langkah kecil tersebut merupakan awal dari perubahan sosial yang amat besar, yang harus kita lakukan sejak sekarang ini juga. Kita mulai dari diri dan dari keluarga kita masing-masing. Mudah-mudahan, secara bertahap, tetapi dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita akan mampu menjadi salah satu negara yang berperingkat tinggi dalam skala pemerintahan yang dikelola dengan baik. Tetapi lebih penting lagi, dengan langkah ini kita akan dapat memanfaatkan sumber daya nasional secara lebih efektif dan efisien, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sidang yang saya muliakan,

Cukup banyak pelajaran dari negara-negara tetangga yang menunjukkan betapa kesejahteraan rakyat selalu cenderung berbanding lurus dengan pemerintahan yang bersih, yang selanjutnya juga merupakan faktor penting bagi terpeliharanya stabilitas politik, stabilitas sosial, serta stabilitas keamanan. Pengalaman juga menunjukkan bahwa rangkaian stabilitas inilah yang kemudian justru merupakan syarat mutlak untuk kemajuan ekonomi yang dapat dinikmati oleh seluruh rakyat.

Beberapa waktu terakhir ini, dalam masyarakat berkembang wacana tentang konsep ekonomi kerakyatan atau ekonomi rakyat. Harus diakui, sesungguhnya belum jelas benar pengertian, lingkup dan isi konsep tersebut. Kiranya sidang yang mulia ini juga sependapat, bahwa dalam situasi peralihan seperti sekarang ini, seyogyanya kita dapat benar-benar memantapkan terlebih dahulu pemahaman terhadap hal-hal yang bersifat mendasar tadi, sebelum men-sosialisasikannya. Tanpa itu, saya khawatir yang muncul adalah kebingungan dalam masyarakat, atau harapan yang ternyata sulit diwujudkan.

Sebagaimana konsep pada umumnya, kita juga memerlukan kemampuan untuk memberi wujud atau gambaran tentang konsep yang diwacanakan tadi. Sebagai konsep yang pasti diharapkan dapat tampil sebagai sistem nasional, jelas diperlukan kemampuan untuk menjabarkannya dalam strategi dan program yang benar-

benar dapat dioperasionalkan. Kita memiliki banyak pengalaman dengan berbagai konsep, tetapi kita sendiri mengalami kesulitan dalam mengimplementasikannya. Inilah sebabnya, saya sangat berharap bahwa kita dapat bersikap arif dalam memperkenalkan konsep-konsep baru yang diharapkan akan tampil sebagai sistem nasional. Sebab, dalam kaitannya dengan masalah kesejahteraan dan perekonomian tadi, rasanya kita telah memiliki acuan yang jernih dalam UUD 1945: "*memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,...*" dan seterusnya. Yang kita perlukan adalah, pengembangan dan penjabaran untuk bidang-bidang tersebut, sehingga mampu tampil sebagai sistem nasional.

Dalam kerangka ini pula, ungkapan mengenai masalah visi dan strategi pembangunan sebagaimana tadi saya kemukakan, mudah-mudahan dapat menjadi pemikiran kita semua.

Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan,

Mengoperasikan suatu sistem ekonomi modern tanpa dukungan sistem perbankan nasional yang andal, rasanya memang sebuah keniscayaan. Kita perlu belajar banyak dari pengalaman pahit dalam mengelola dunia perbankan, khususnya sejak liberalisasi ekonomi tahun 1983. Kita telah melakukan pelanggaran terhadap demikian banyak kaidah pengelolaan perbankan yang konservatif, yang telah dibangun dunia dalam waktu demikian lama. Kita sungguh-sungguh perlu belajar dari pengalaman tersebut, agar kita jangan bagaikan orang tua yang dua kali kehilangan tongkat.

Mau tidak mau, sekarang ini kita telah merupakan bagian dari dunia baru yang bersifat global, baik dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Apa yang terjadi di negeri lain berpengaruh terhadap negeri kita, dan begitu juga sebaliknya. Dalam rangka kepentingan ekonomi, kita telah mengadakan perikatan secara formal dengan negeri-negeri lain itu, baik secara bilateral maupun secara multilateral.

Pada umumnya perikatan memang dibuat dengan semangat sating menguntungkan. Harus diakui, beberapa di antaranya, dewasa ini terasa demikian memberatkan. Karenanya, tidaklah terlalu salah bila di antara kita kemudian berkembang pemikiran untuk meminta penyesuaian perikatan-perikatan yang memberatkan itu. Tetapi apapun sebab-sebabnya, dan tanpa mengurangi penghargaan terhadap segala iktikad baik yang dicerminkan dari pemikiran tersebut, perikatan tetaplah perikatan. Perjanjian tetaplah perjanjian, baik nasional maupun internasional.

Kita harus berusaha sekeras-kerasnya agar komitmen kita dalam setiap perikatan itu tetap dapat kita penuhi. Sekalipun begitu, sudah barang tentu kita akan sangat berterima kasih jika negara-negara sahabat serta pihak kreditur terkait lainnya, dapat memberikan sedikit ruang gerak serta kesempatan bernafas kepada kita, agar kita dapat membenahi kembali kehidupan nasional dalam masa transisi yang amat berat ini.

Kita juga menghadapi tantangan jangka pendek yang harus kita jawab dengan sungguh-sungguh melalui kerja keras yaitu keikutsertaan kita dalam AFTA dan WTO. Saya percaya bahwa adalah amat berat untuk memelihara daya saing nasional dalam suasana perdagangan dunia yang semakin terbuka dan sangat bersaing, pada saat ekonomi kita berada dalam posisi tawar yang demikian rendah.

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,

Izinkanlah saya sekarang mengulas masalah pemulihan dan pemeliharaan stabilitas keamanan dan pertahanan nasional. Tidak banyak yang dapat kita lakukan bila keamanan ini tidak ada, atau bila batas-batas wilayah kita dilanggar tanpa mampu melakukan pencegahan dan perlawanan. Kita memerlukan sistem serta aparatur keamanan yang efektif, berdisiplin tinggi, serta berada di bawah kendali pemerintah, namun tetap berjiwa kerakyatan.

Seiring dengan bergulirnya reformasi nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih demokratis, TNI telah menyatakan komitmennya untuk terus melaksanakan reformasi internal TNI dengan langkah-langkah konkrit menempatkan diri secara profesional dan fungsional sebagai alat pertahanan negara dan mendukung tegaknya demokrasi serta mematuhi hukum dan menghormati hak asasi manusia.

Secara konsisten kita sudah mulai memisahkan jajaran TNI dan jajaran Polri, walaupun dalam kasus-kasus tertentu diperlukan bantuan militer untuk mendukung tugas-tugas Polri di lapangan. Namun adalah jelas bahwa TNI harus berkonsentrasi dalam mempertahankan integritas wilayah nasional, sedangkan Polri harus memusatkan perhatiannya pada penciptaan keamanan serta rasa aman di kalangan masyarakat.

Oleh karena itu, bersama dengan kebutuhan untuk melengkapi dan meningkatkan kemampuan profesional TNI dan Polri, negara memang semestinya menjamin tersedianya perlengkapan dan dukungan minimal untuk terlaksananya tugas keamanan dan pertahanan yang kita amanatkan. Sungguh tidak masuk akal apabila kita memberikan tugas yang demikian berat kepada para prajurit, tetapi mengabaikan penyediaan perlengkapan serta dukungan logistik yang mereka butuhkan dalam jumlah dan kualitas yang wajar.

Diperlukan jadwal dan agenda yang jelas dalam menindaklanjuti kebijakan nasional mengenai TNI dan Polri ini. Demikian banyak peraturan perundang-undangan yang harus kita perbaiki, doktrin dasar dan doktrin pelaksanaan yang harus kita perbaharui, serta program penyegaran pendidikan dan pelatihan yang harus kita adakan.

Saya paham masih ada sisa-sisa masalah masa lampau yang harus kita selesaikan bersama dalam rangka reposisi TNI dan Polri, khususnya tentang masalah terjadinya pelanggaran berat hak asasi manusia di daerah konflik bersenjata. Sebagian di antara pelanggaran tersebut kita ketahui secara serta merta,

antara lain melalui liputan media internasional. Sebagian lagi baru kita ketahui kemudian.

Harus diakui, bahwa banyak isi liputan tersebut yang amat menyudutkan kita. Tetapi sikap kita dalam hal ini juga jelas. Bila memang terdapat sungguh-sungguh bukti yang meyakinkan tentang telah terjadinya pelanggaran berat hak asasi manusia di luar medan pertempuran, pelanggaran tersebut harus ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak boleh ada kesan bahwa kita menutup-nutupi pelanggaran berat tersebut. Bagaimanapun Republik Indonesia adalah negara hukum. Tidak seorang pun berada di luar atau di atas hukum, bahkan juga seorang Presiden sendiri sekalipun.

Saudara-saudara yang terhormat, dan Sidang yang saya muliakan,

Dalam mempersiapkan diri menghadapi masa depan yang lebih baik ini, izinkan saya mengemukakan tiga masalah masa lampau yang memerlukan penanganan komprehensif dan mendasar. Tiga masalah tersebut adalah masalah Timor Timur, masalah Aceh, dan masalah Irian Jaya.

Sejak awal, esensi masalah Timor Timur bersifat internasional, khususnya dalam rangka proses dekolonisasi. Tidak ada disain khusus Republik Indonesia untuk daerah itu. Keterlibatan kita di daerah tersebut pasti bukan dengan sengaja, oleh karena para Pendiri Negara menganut sikap bahwa yang disebut wilayah Indonesia adalah daerah-daerah eks Hindia Belanda dahulu. Tidak lebih dan tidak kurang.

Tanpa perlu mengorek kembali sebab-musababnya, sekarang kita telah menyelesaikan masalah Timor Timur ini secara mendasar pada tahun 1999, dan secara terbuka menghormati pilihan saudara-saudara kita di daerah itu untuk hidup di negaranya sendiri. Namun sisa-sisa masalahnya masih harus kita selesaikan, antara lain penyelesaian masalah pengungsi di Propinsi Nusa Tenggara Timur yang jumlahnya lumayan banyak, serta masalah pelayanan

terhadap saudara-saudara kita warga Timor Timur yang merasa lebih nyaman tetap berada di wilayah kita atau menjadi warga negara Republik Indonesia.

Konteks masalah Aceh dan Irian Jaya sama sekali berbeda dengan masalah Timor Timur. Masalah ini merupakan masalah dalam negeri kita sendiri, khususnya masalah *nation- and state-building*. Dalam hal ini hams kita akui dengan jujur, pangkalnya adalah berbagai kebijakan di masa lampau, *yang* dirasa amat merugikan rakyat di daerah-daerah tersebut. Oleh karenanya adalah wajar jika kita sebagai bangsa menyampaikan permintaan maaf yang setulus-tulusnya kepada saudara-saudara kita yang telah menderita demikian lama akibat kebijakan nasional yang tidak tepat itu.

Namun pernyataan maaf saja jelas tidaklah cukup. Pernyataan maaf tersebut harus diiringi dengan berbagai penataan baru yang akan menjamin pulihnya keadaan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Demikianlah, pada saat ini kita sedang mengadakan koreksi mendasar terhadap kondisi di dua daerah tersebut, baik dengan menghormati identitas budaya serta karakteristik khas masyarakat daerah-daerah tersebut, maupun dengan memberikan wewenang lebih besar pada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dalam format otonomi khusus. Sekalipun demikian, satu hal tetap jelas. Seluruhnya itu tetap hams dalam konteks terpeliharanya integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Izinkanlah saya menggarisbawahi secara khusus urgensi terpeliharanya integritas wilayah negara ini. Keutuhan wilayah bukan saja merupakan salah satu atribut dari adanya negara, tetapi juga merupakan bagian dari suatu tatanan dunia yang lebih stabil, yang batas-batasnya tidak akan diubah-ubah lagi dengan alasan apapun juga. Dalam hubungan inilah, maka gerakan yang bertujuan memisahkan suatu wilayah negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan saja akan kita tentang, tetapi juga tidak akan pernah mendapatkan dukungan dari komunitas bangsa-bangsa lainnya

Kenyataan ini perlu diperhatikan baik-baik oleh unsur pimpinan gerakan pemisahan diri, khususnya yang telah memilih jalan kekerasan bersenjata, yang telah memakan demikian banyak korban di kalangan rakyat yang tidak berdosa. Melalui forum ini saya mengajak saudara-saudara yang karena berbagai sebab telah memilih aksi kekerasan bersenjata itu, untuk kembali ke masyarakat, dan bersama-sama membangun suatu Indonesia baru yang lebih baik dari apa yang selama ini sudah kita alami. Seperti saya katakan tadi, pada saat ini, telah tersedia perangkat otonomi khusus, yang saya percaya dapat merupakan wadah yang cukup longgar untuk mewujudkan aspirasi dan kepentingan yang absah dari Saudara-saudara sekalian.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua serta para anggota Dewan yang saya hormati, Saudara-saudara yang saya cintai,

Berdasar pemahaman saya terhadap semua keadaan itulah, saya telah menyusun Kabinet Gotong Royong untuk melaksanakan amanah yang telah Saudara-saudara percayakan kepada saya sampai akhir masa jabatan tahun 2004 nanti.

Saya meminta maaf, atas agak lambatnya saya mengumumkan susunan kabinet baru tadi. Alasannya tidak lain adalah, karena tidaklah mudah untuk memilih yang paling tepat di antara demikian banyak calon Menteri yang seluruhnya merupakan putra dan putri terbaik bangsa. Hanya karena keterbatasan tempat saja yang menyebabkan tidak seluruhnya dapat saya dudukkan menjadi Menteri Koordinator, Menteri yang memimpin departemen, ataupun Menteri Negara. Mudah-mudahan lain kali saudara-saudara yang lain juga mendapat gilirannya.

Sebagai upaya untuk menjawab permasalahan yang tadi saya sampaikan, izinkanlah saya mengulangi enam Program Pokok Kabinet Gotong Royong tersebut.

- Mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka utuh Negara Kesatuan Republik Indonesia

- * Meneruskan proses reformasi dan demokratisasi dalam seluruh aspek kehidupan nasional melalui kerangka, arah, dan agenda yang lebih jelas, dengan terus meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
- * Normalisasi kehidupan ekonomi dan kemasyarakatan untuk memperkuat dasar bagi kehidupan perekonomian rakyat.
- * Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten, mewujudkan rasa aman serta tentram dalam kehidupan masyarakat, melakukan pembrantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.
- * Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif, memulihkan martabat bangsa dan negara serta kepercayaan luar negeri, termasuk lembaga-lembaga pemberi pinjaman dan kalangan investor terhadap pemerintah.
- * Mempersiapkan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2004 yang aman, tertib, rahasia dan langsung.

Saya menyadari, Kabinet ini tidak akan dapat bekerja sendiri tanpa adanya pengertian, kerjasama dan dukungan dari segala pihak. Melalui forum ini, saya sekali lagi meminta pengertian, kerjasama dan dukungan tersebut. Hanya dengan cara seperti itu kita bersama akan secara bertahap dapat keluar dari krisis yang amat menyakitkan ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang selalu melimpahi kita dengan Rahmat, Taufiq, Hidayah, serta Inayah-Nya. Terimakasih.

Wassalamu afaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Jakarta, 16 Agustus 2001.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI